

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

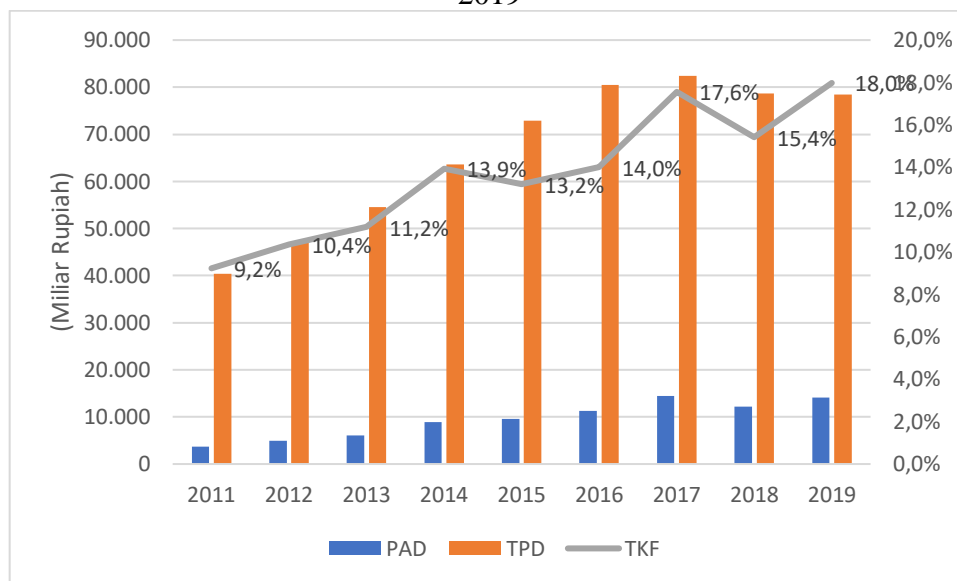
Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2008). Tujuan kemandirian fiskal sendiri yaitu untuk menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi artinya sebuah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom dengan tujuan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah tidak bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka kemandirian fiskal perlu mendapat perhatian lebih di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Otonomi daerah ialah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saragih, 2003). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah lebih leluasa dalam menjalankan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi daerah untuk tercapainya

tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal yang sangat berkaitan dengan otonomi daerah yaitu untuk memampukan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.

Gambar 1. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah (TPD), dan Tingkat Kemandirian Fiskal (TKF) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019

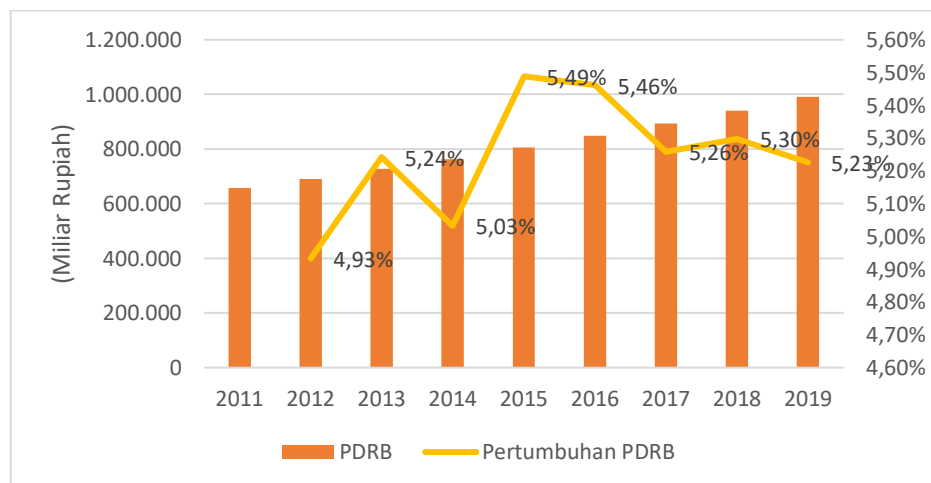


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Grafik 1-1, terlihat bahwa PAD dan TPD di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2019 cenderung mengalami peningkatan, meski cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2019. Rasio antara PAD terhadap TPD menunjukkan TKF. Rasio tersebut terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah PAD. Meski demikian, TKF di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah karena masih di bawah 25%, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah belum mandiri. Hal ini dapat berdampak pada kondisi perekonomian nasional sebab tujuan dari desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum sepenuhnya tercapai.

Kemandirian fiskal suatu daerah erat kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB merupakan nilai barang dan jasa di suatu daerah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung pada aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Artinya, dengan PDRB yang tinggi, maka daerah akan mampu membiayai kebutuhannya sendiri (Adriana, Basri, & Indrawati, 2017).

Gambar 1. 2 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019

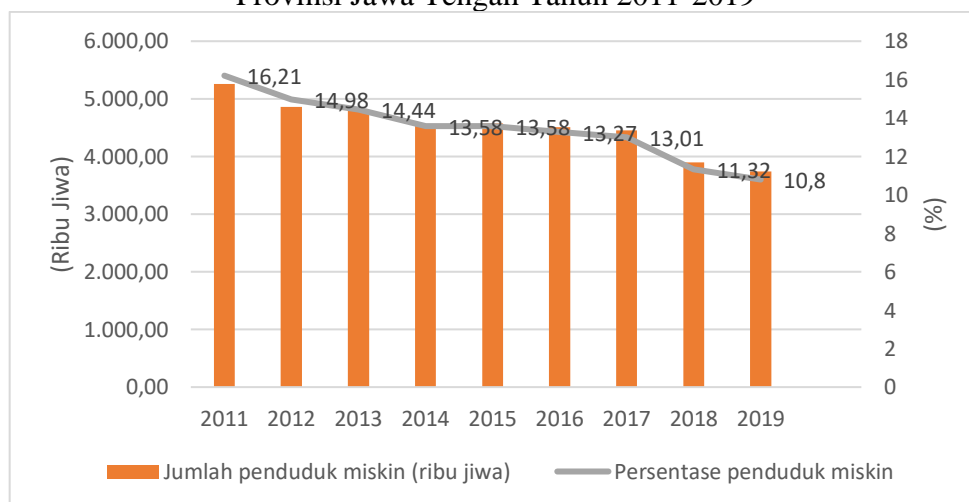


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Grafik 1-2, nampak bahwa PDRB di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2019 meningkat setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Jawa Tengah semakin tinggi. Peningkatan tersebut menandakan semakin besarnya penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Meski demikian, pertumbuhan PDRB cenderung berfluktuasi dan menurun sejak tahun 2017. Namun, pertumbuhan yang kurang stabil tersebut menunjukkan konsistensi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas PDB nasional yang berkisar 5% dalam 10 tahun terakhir (jatengprov.go.id, 2020).

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS Jateng, 2019). Ketika suatu daerah tergolong memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, maka daerah tersebut juga memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena dengan sumber keuangan yang baik, maka daerah dapat membiayai dan membuat program yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan pada daerah tersebut (Yudha, 2020). Artinya, apabila pendapatan asli suatu daerah lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan program pengentasan kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan menurun dan kemandirian fiskal dapat tercapai.

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

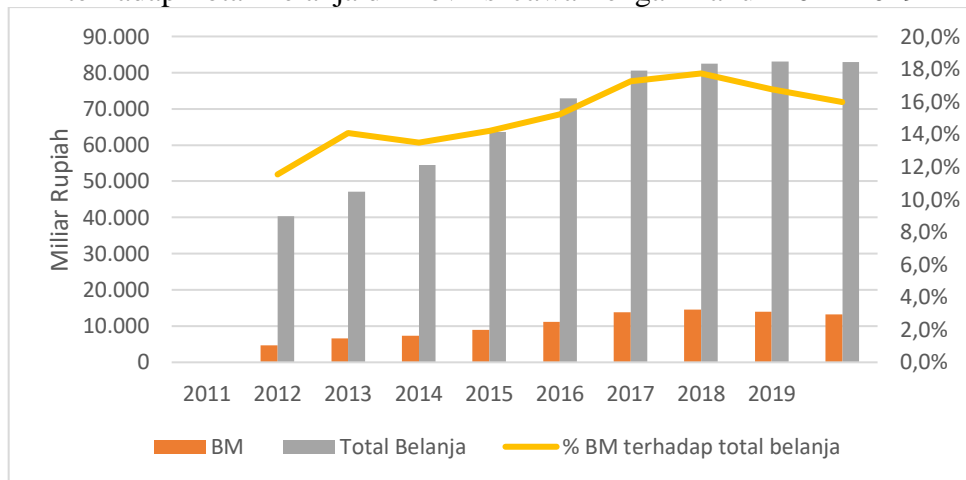
Berdasarkan Grafik 1-3, nampak bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan selama tahun 2011-2019. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk memberantas kemiskinan salah satunya melalui program Satu Desa Satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Program tersebut berusaha untuk memberikan pendampingan pada masyarakat desa miskin sesuai sektor yang dipilih kemudian memberikan metode pengembangan desa tanpa memberi bantuan dana (jatengprov.go.id, 2021). Diharapkan pemerintah konsisten menurunkan angka kemiskinan sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi yang dapat meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal.

Selain PDRB dan jumlah penduduk miskin, belanja modal juga memegang peranan yang sangat penting terhadap kemandirian fiskal suatu daerah. Kegiatan belanja modal dapat membawa efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian melalui pembangunan jalan, jembatan, pabrik, dan sebagainya (Halim, 2014). Adanya realisasi belanja modal dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan dan kemandirian fiskal. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak terhadap kenaikan pajak daerah yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Wong (2004) dalam Apriana & Suryanto (2010)).

Berdasarkan Grafik 1-4, terlihat bahwa belanja modal dan total belanja di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dari tahun 2011-2019 meskipun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Sementara itu, persentase belanja modal terhadap total belanja cenderung berfluktuasi. Persentase tersebut menunjukkan bahwa porsi anggaran belanja modal masih tergolong rendah dibandingkan dengan porsi belanja lain. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah belum berfokus pada peningkatan infrastruktur yang pada dasarnya dapat memberikan efek pengganda bagi perekonomian.

Gambar 1. 4 Belanja Modal, Total Belanja, dan Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

B. Rumusan Masalah

Salah satu indikator baiknya perekonomian nasional dapat dilihat dari tingkat kemandirian fiskal daerahnya. Kemandirian fiskal dapat diukur dengan menghitung rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi tentu dapat mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang baik.

Tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah karena berada di bawah angka 25%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Akan tetapi, jumlah pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah cenderung stabil dan memiliki selisih sedikit lebih besar dari dana transfer.

Pemerintah daerah hendaknya memberikan perhatian lebih agar daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga porsi pembiayaan belanja daerah sebagian besar dapat terpenuhi oleh pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah juga akan tercapai. Berdasarkan latar belakang

masalah, maka perlu adanya penelitian untuk mengestimasi pengaruh PDRB, kemiskinan, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh PDRB, kemiskinan, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019, serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan tingkat kemandirian fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

C.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan masalah kemandirian fiskal.
2. Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan instansi-instansi terkait kemandirian fiskal di Indonesia.
3. Memberi gambaran bagi penelitian sejenis selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini yang memuat uraian secara garis besar isi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang tingkat kemandirian fiskal, PDRB, kemiskinan, dan belanja modal, serta menerangkan mengenai penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, serta analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari analisis data dan implementasi ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir dari bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran guna untuk perbaikan dan referensi penelitian selanjutnya dalam lingkup pembahasan yang sama.